

RENJA

RENCANA KERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2023/>

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Oktober 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTYAR, S.P., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	4
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	11
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	13
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	22
BAB III.....	24
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	25
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	27
BAB IV	32
PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD9

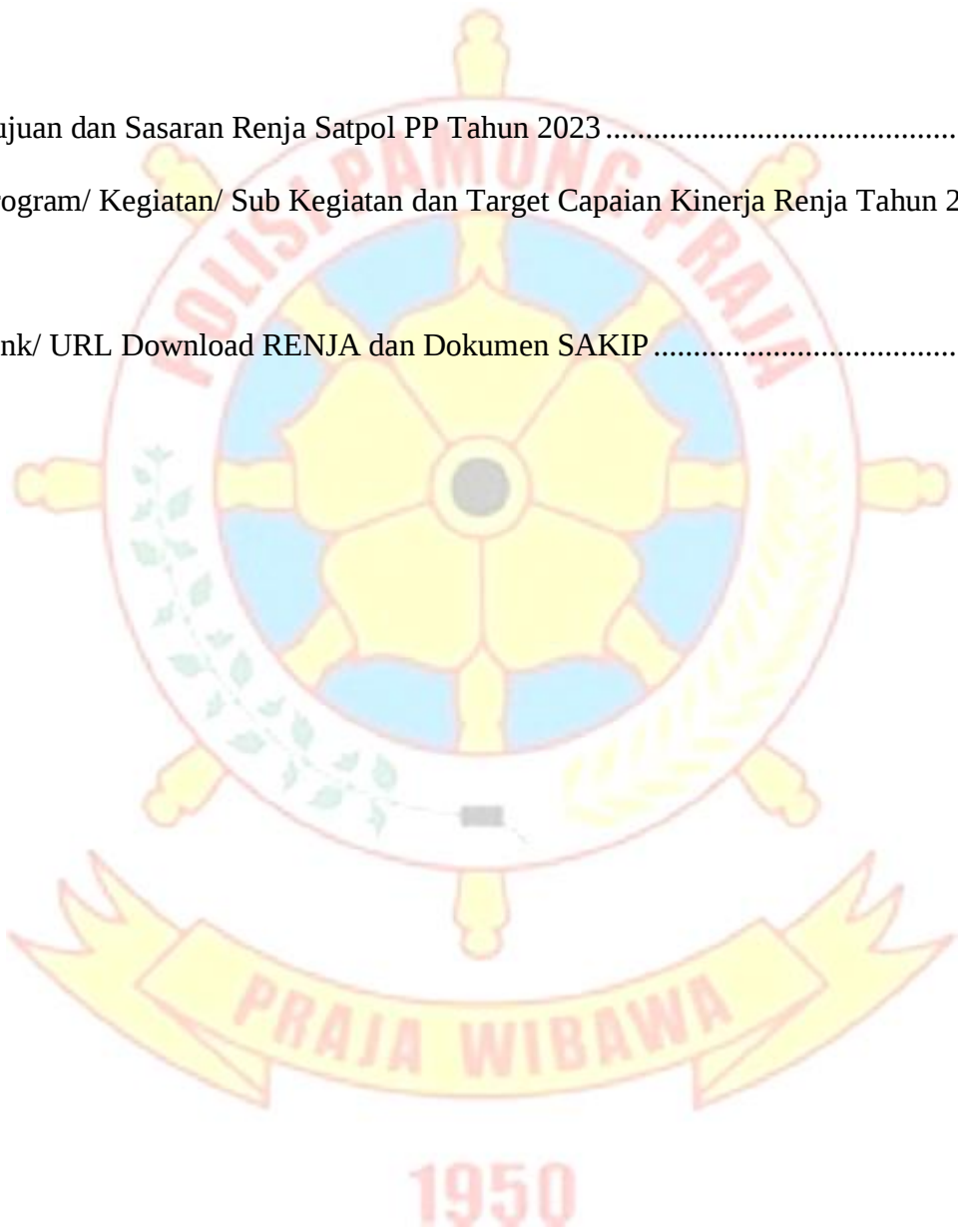
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 14

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023..... 23

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2023 26

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2023..... 28

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP 33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKPA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan Dokumen Anggaran;
- f. Sebagai patokan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

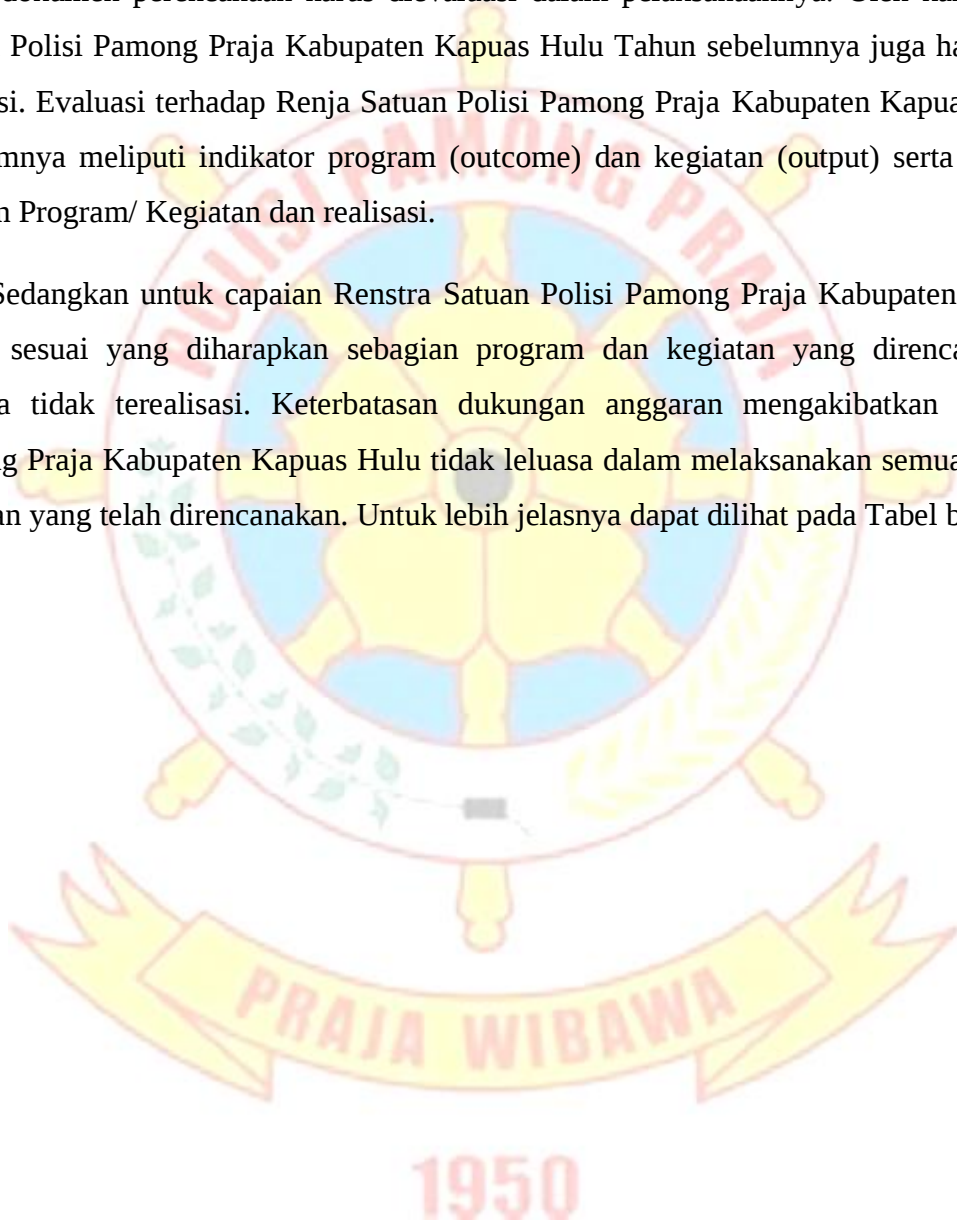
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan sebagian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2022	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12
05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	26,01	-	-	-	-	25,01	#VALUE!	#VALUE!	
		Nilai SAKIP	A	BB	BB	BB	100	BB	85,71	85,71%	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	BB	BB	BB	100,00	BB	85,71	85,71%	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95%	103,18%	95%	98,42%	103,60	95%	98,87%	104,07%	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	95%	0%	0%	0%	#DIV/0!	95%	31,67%	33,33%	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	0%	95%	100%	105,26	95%	65,00%	68,42%	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	14	0	0	0	#DIV/0!	6	2	14,29%	

		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	98,48%	95%	99,54%	104,78	95%	97,67%	102,81%	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	0%	95%	100%	105,26	95%	65,00%	68,42%	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	98,48%	95%	95,62%	100,65	95%	96,37%	101,44%	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	87%	98,24%	90%	93,62%	104,03	90%	93,95%	107,99%	
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Rasio Petugas LINMAS	1,00	0,95	0,98	0,84	86,07	0,96	0,92	91,82%	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	120%	216	181	83,80	213	131,73	53,55%	

02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Rasio Petugas LINMAS	1,00	0,95	0,98	0,84	86,07	0,96	0,92	91,82%	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	1	216	181	83,80	213	131,73	53,55%	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	60%	0%	0%	0%	#DIV/0!	33,33%	11,11%	18,52%	

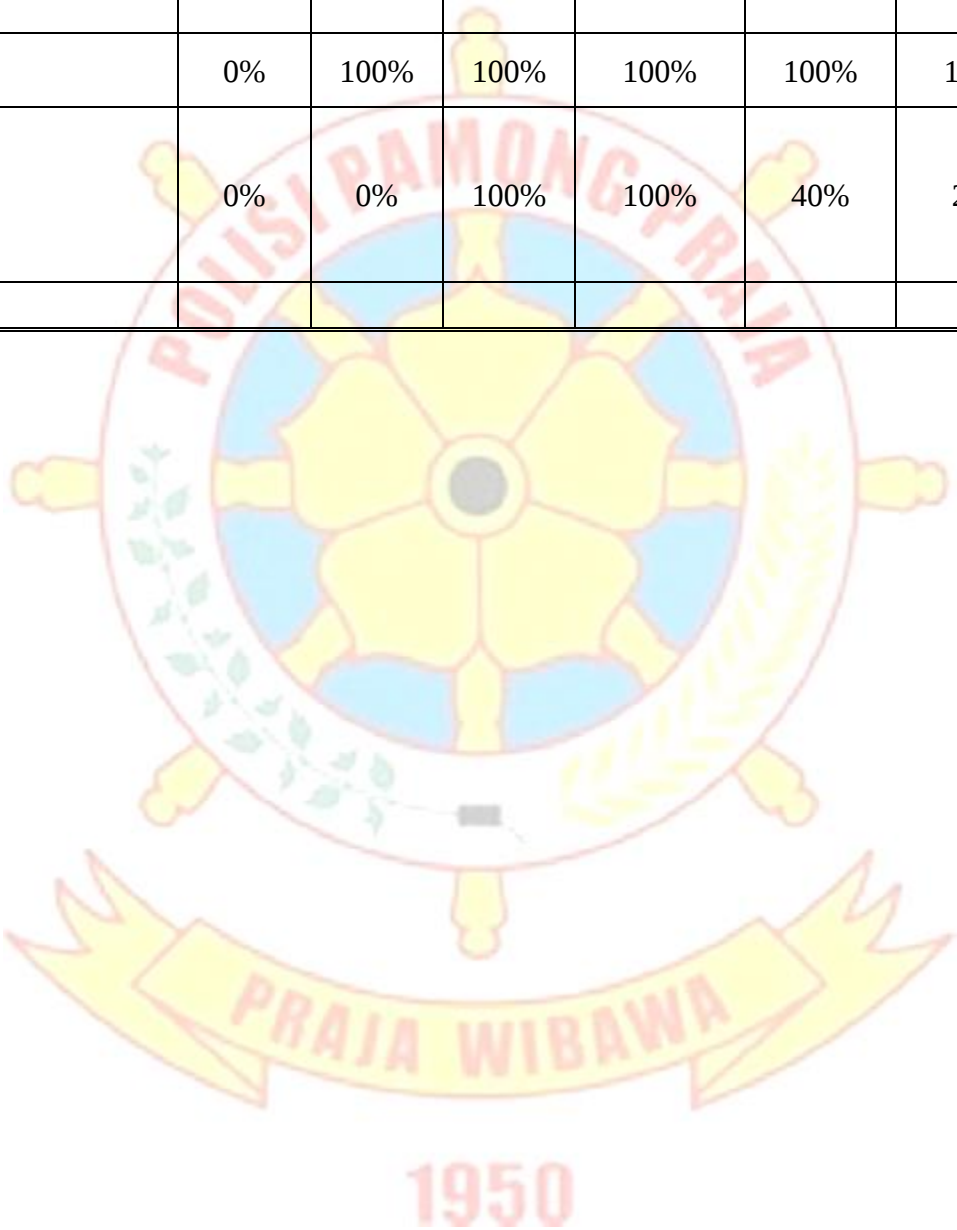
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan IKK Perraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM/standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		nasional	Permendagri 18 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP			0	0	25,01	25,26	0	25,48	25,50	25,55	
2	Nilai SAKIP			CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%		10	10	10	10	0	1	2	3	Capaian rendah menunjukkan kinerja yang baik
4	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			100%	100%	100%	100%	24	1.262	50	60	Tahun 2021 ledakan pelanggaran kasus protokol kesehatan covid-19
5	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			0	0	0	0	0	21	20	30	
6	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			0	0	0	0	3	3	3	4	
7	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			0	0	1	1	0	0	0	1	
8	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	Tersedianya sarana prasarana minimal			0	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	

10	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan			0%	0%	100%	100%	40%	27%	40%	40%	Formulasi perhitungan SAKIP dan LPPD berbeda



2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL"**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegkan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti tes Jabatan Fungsional tidak ada;
12. Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/ Perkada;
13. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Kesamaptaan;
14. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
15. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
16. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
17. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
18. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
19. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
20. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
21. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
22. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
23. Kenakalan remaja dan pelajar;
24. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					17.521.589.730	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					10.170.541.220
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	14.048.958.630	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,26	9.133.264.975	
			Nilai SAKIP	BB				Nilai SAKIP	BB		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	89.615.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	98.298.250	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	32.562.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	25.269.250	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.034.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.164.000	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	9.833.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	11.363.000	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.612.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.322.000	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	10.758.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	11.648.000	

01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	12.325.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	14.084.000	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8.491.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	16.448.000	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	95	6.649.556.160	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Keuangan	95	6.449.569.960	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.550	6.366.339.960	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.540	6.180.939.960	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	156	253.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	156	233.428.000	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	25.482.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	31.562.200	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.675.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.639.800	
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.618.400	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	

01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	2.749.913.820	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	0	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2.668.961.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	28.808.710	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	676	5.514.110	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	46.630.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	794.878.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	528.384.350	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	22.649.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.419.000	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	209.725.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	

01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	14.595.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	199.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	102.204.000	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.818.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	16.677.750	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	5.742.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	6.120.000	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	268.349.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	323.563.600	
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	58.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14	71.400.000	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	1.697.690.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	1.475.230.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	38.080.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	184.380.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	

01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	1.829.894.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	1.791.107.190	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715	8.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	6.660.000	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	41.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	58.440.000	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	17.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	17.250.000	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126	1.762.324.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	123	1.708.757.190	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90,00	237.410.550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89,00	265.905.225	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14.632	216.750.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9.975	244.630.225	
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	20.660.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	21.275.000	

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	3.472.631.100	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	1.037.276.245	
			Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100				Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100		
			Rasio Petugas LINMAS	0,96				Rasio Petugas LINMAS	0,97		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	3.154.905.800	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	933.720.960	
			Rasio Petugas LINMAS	0,96				Rasio Petugas LINMAS	0,97		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200		

02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50	967.602.100	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50	588.532.950	
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	109.107.800	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	14	63.042.900	
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	70.430.400	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	22.568.610	
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64	903.432.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	121.154.000	

02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	1.096.333.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	133.322.500	
02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	8.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8	5.100.000	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	277.725.300	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	103.555.285	
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	33.935.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	21.516.940	
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	147.364.500	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	27.758.145	
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	5	96.425.800	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	5	54.280.200	

			Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	33,33	40.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	0	0	
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	40.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	0	
TOTAL					17.521.589.730						10.170.541.220

Sumber: - <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Sistem-Informasi-Pemerintahan-Daerah-Cetak-Renja.pdf>
- <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Sistem-Informasi-Pemerintahan-Daerah-Cetak-Renja-2.pdf>

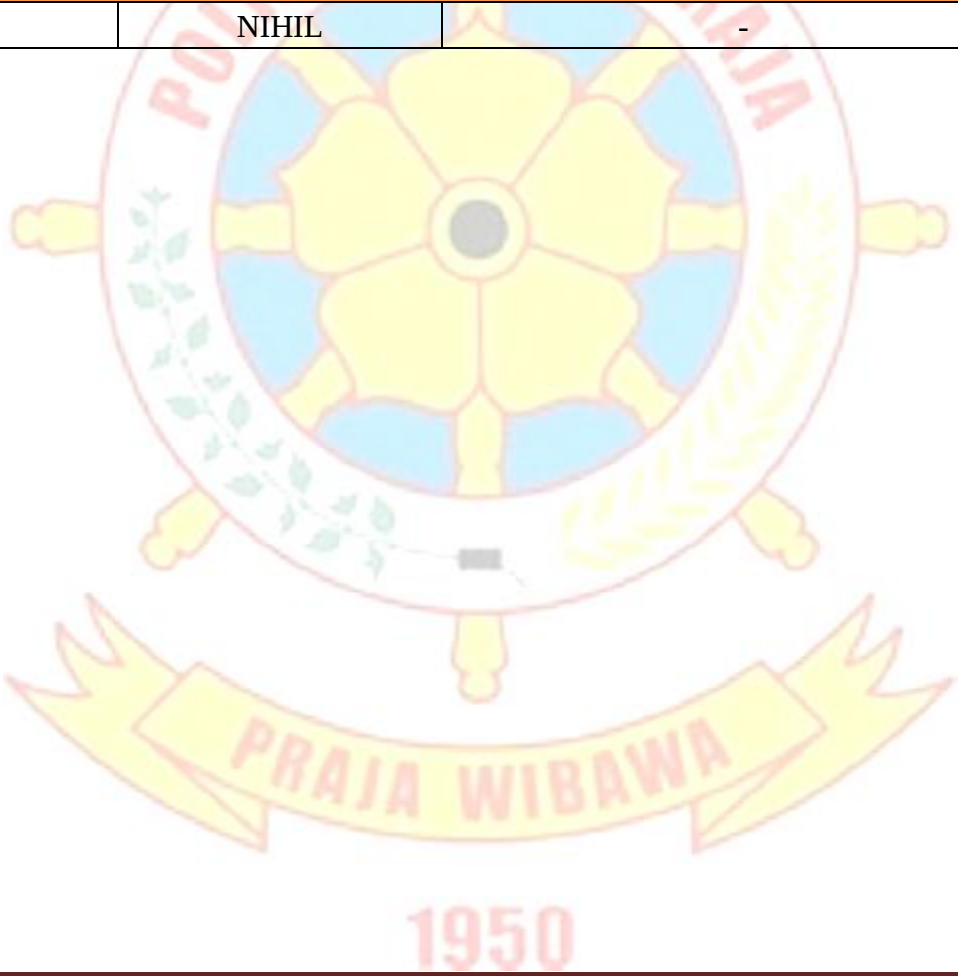
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sesuai dengan [Renstra 2021-2026](#) adalah :

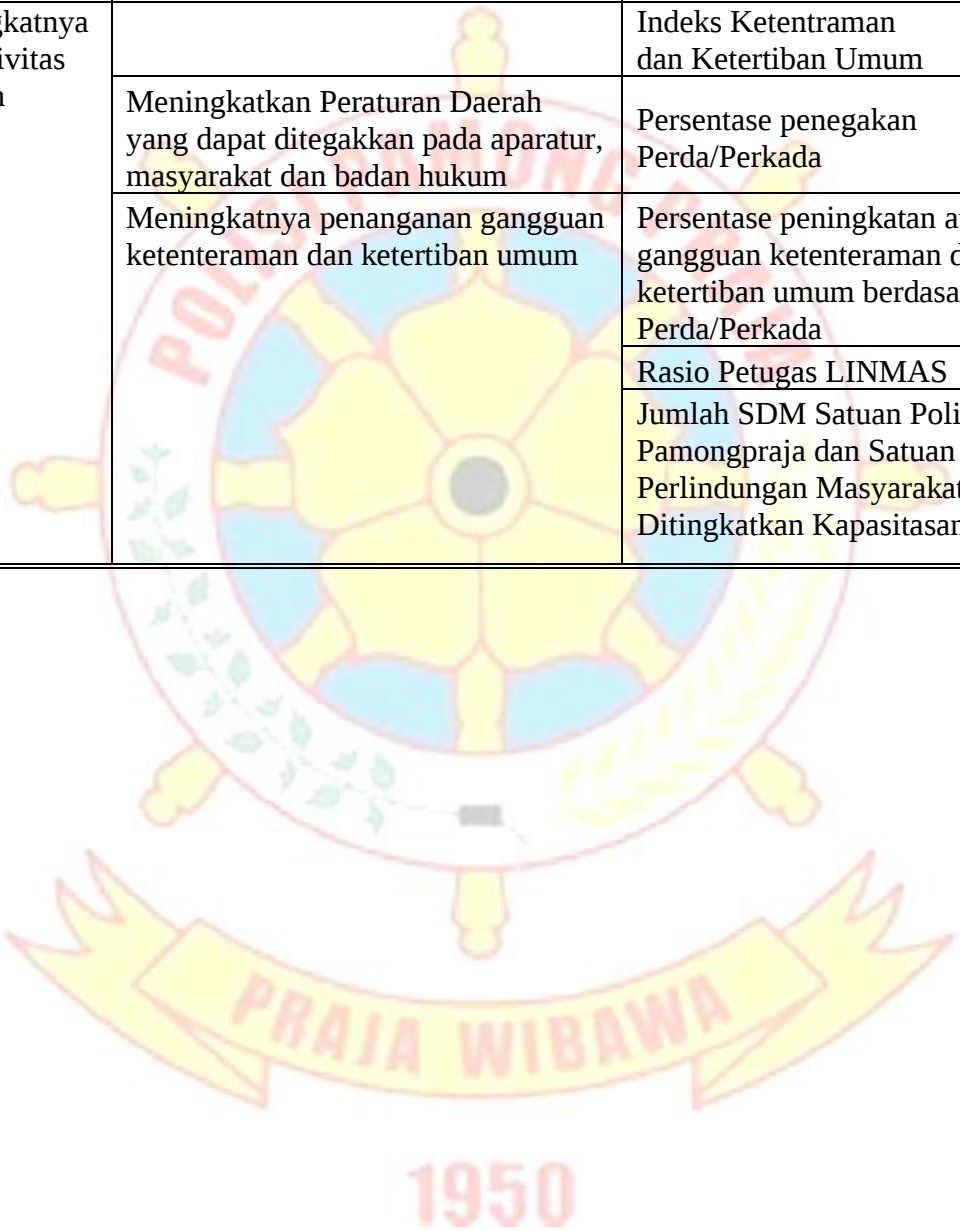
- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan kondusivitas wilayah.

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparaturnya, masyarakat dan badan hukum;
- c. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,26
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,26
			Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
		Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%
			Rasio Petugas LINMAS	0,97
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200



3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 program dan 7 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan nilai SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 5 Kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran 2 : Meningkatnya kondusivitas wilayah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan 9 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

➤ Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

➤ Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

➤ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

➤ Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

➤ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

➤ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

➤ Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2022	Satuan	2023		2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target		Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							10.170.541.220		11.119.205.088		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01	Indeks	25,26	9.133.264.975	25,51	9.983.865.031	Kasat
		01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,01	Indeks	25,26	9.133.264.975	25,51	9.983.865.031	
				Nilai SAKIP	BB	Pedikat	BB		BB		
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	BB	98.298.250	BB	103.213.163	Sekretariat
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dok.	16	25.269.250	16	26.532.713	Sub Bagian Program
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	9.164.000	1	9.622.200	
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok.	4	11.363.000	4	11.931.150	
		01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dok.	1	10.322.000	1	10.838.100	

		DPA-SKPD								
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok.	4	11.648.000	4	12.230.400		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	Lap.	28	14.084.000	28	14.788.200		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap.	8	16.448.000	8	17.270.400		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	95	6.449.569.960	95	6.775.985.265	Sekretariat	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.540	OB	2.540	6.180.939.960	2.540	6.489.986.958		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	90	Dok.	156	233.428.000	156	245.099.400		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	Dok.	70	31.562.200	70	33.140.310		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap.	1	3.639.800	1	3.821.790		Sub Bagian Keuangan
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok.	0	0	1	3.936.807		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	95		95		Sekretariat	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Org	0	0	0	190.000.000	Bid. PKP	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Pkt	0	0	1	100.000.000		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dok.	0	0	2	20.000.000		Sub Bagian Umum dan Aparatur
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dok.	0	0	676	10.000.000		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Org	0	0	10	60.000.000		Bid. PKP
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	95	528.384.350	95	754.803.568	Sekretariat	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Pkt	1	8.419.000	1	8.839.950		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Pkt	0	0	1	100.000.000		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Pkt	0	0	1	100.000.000		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Pkt	1	102.204.000	1	107.314.200		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pkt	1	16.677.750	1	17.511.638		Sub Bagian Umum dan Aparatur
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dok.	48	6.120.000	48	6.426.000		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap.	150	323.563.600	180	339.741.780		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	Dok.	14	71.400.000	14	74.970.000		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	95	%	95	1.791.107.190	95	1.880.662.550	Sekretariat	

				Daerah								
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Lap.	500	6.660.000	700	6.993.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Lap.	96	58.440.000	96	61.362.000		
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	Lap.	25	17.250.000	25	18.112.500		
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126	Lap.	123	1.708.757.190	123	1.794.195.050		
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90	%	89	265.905.225	88	279.200.486	Sekretariat	
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14.632	Lap.	9.975	244.630.225	9.975	256.861.736	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
		01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	21.275.000	1	22.338.750		
Meningkatkan ya kondusivitas wilayah				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	%	100%	1.037.276.245	100%	1.135.340.057	Kasat	
		Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	%	100%	1.037.276.245	100%		1.135.340.057
					Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	%	100%		100%		
					Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/ RT	0,97		0,98		
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	200		210		
		02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100%	%	100%	933.720.960	100%	980.407.008	Bidang Penegakan dan Operasi	
				Rasio Petugas LINMAS	0,96	Linmas/ RT	0,97		0,98		Bid. LINMAS	
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	200		210		Bid. PKP	
		02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	35	Kasus	50	588.532.950	55	617.959.598	Seksi PO	
		02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	14	63.042.900	15	66.195.045		
		02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dok.	1	22.568.610	1	23.697.041		

		02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64	Dok.	24	121.154.000	25	127.211.700	Bid. LINMAS
		02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	Org	200	133.322.500	210	139.988.625	Bid. PKP
		02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	Lap.	8	5.100.000	8	5.355.000	Seksi PO
		02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	103.555.285	100	108.733.049	Bid. PO
		02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	Lap.	3	21.516.940	3	22.592.787	Seksi P2
		02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	Lap.	360	27.758.145	360	29.146.052	
		02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5	Lap.	5	54.280.200	5	56.994.210	
		02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	0	%	0	0	45	46.200.000	Bid. PKP
		02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	Lap.	0	0	1	46.200.000	Bid. PKP
					TOTAL		10.170.541.220		11.119.205.088		-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Download	
1	Renstra	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/			
4	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/			
5	Peta Proses Bisnis	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/			
6	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/			
7	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/perjanjian-kinerja/	pk20\[\$%	bjhd2985	
8	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/	rak3\$@19	hghd640d7fo	
9	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/	tr3**##19		
10	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/	eka”+58		
11	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/	vsi_@^?]\.	jdktrqw1063	
12	LPPD	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/	bn269#^3>?;"[}	vdkw52047	
13	Laporan Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/	l630nfl',10\$	agsbvp2063	
14	Pohon Kinetja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pohon-kinerja/			